



# Ahok Ungkap Dana Siluman Rp 12,1 Triliun

## Balai Kota, Warta Kota

Hubungan antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan DPRD DKI Jakarta, semakin meruncing. Keduanya bersikukuh sama-sama mempertahankan pendapatnya terkait pengajuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 DKI.

Ahok membeberkan data mengenai adanya dana siluman yang diprakarsai oleh DPRD dengan jumlah yang cukup fantastis yakni Rp 12,1 triliun. Salah satunya, dana untuk pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah yang besarnya mencapai Rp 6 miliar untuk setiap sekolah.

## Bagaimana kelanjutan perseteruan Gubernur DKI dengan DPRD?



Saat ditemui *Warta Kota* di Balai Kota, Rabu (25/2), Ahok yang hendak pergi ke dokter gigi, dengan mengenakan batik cokelat, menyampaikan kekecewaannya terhadap oknum DPRD DKI yang memasukkan tipisan dana yang jumlahnya tidak rasional tersebut.

Ketika awak media bertanya soal adanya desakan massa yang menginginkan mandat Ahok sebagai Gubernur dicabut, mantan Bupati Belitung ini menanggapi dengan santai. "Aduh, lu suruh seluruh orang Jakarta cabut gua, gua tetap Gubernur sampai 2017. He, he. Pusing amat. Kayak seperti pas peresmian Rusun Tambora kemarin, bilang warga banyak nolak gua, kayaknya yang ngajak foto lebih banyak, yang ngajak salaman juga banyak, jadi gimana coba?" kata Ahok sambil tersenyum.

## Meradang

Namun, senyum Ahok berubah sedikit meradang saat ditanya mengenai dana APBD yang belum turun, karena berakibat pembangunan sekolah di Jakarta Barat terhenti. "Sekolah di Jakarta 46 persen jelek. Itu yang diotaknya DPRD? Waktu dia susun, dia mau ngapain yang dia susun. Pengadaan peralatan audio kelas Rp 4,5 miliar, pengadaan alat peraga pendidikan usia dini Rp 15 miliar, pelatihan guru Rp 25 miliar. Masuk akal nggak yang mereka bikin?" ujarinya.

Kemudian Ahok meminta stafnya mengambil data dana siluman yang diprakarsai oleh DPRD. "Tolong ambil, mana itu data yang dari Disdik," kata Ahok di depan pintu masuk Balai Kota.

Beberapa stafnya pun langsung masuk ke dalam ruangan kerja Ahok. Kemudian menyerahkan beberapa lembar kertas berwarna putih berisi data-data 'dana siluman' tersebut. "Ini yang saya bilang dana siluman. Lihat nih semua, pengadaan UPS Rp 6 M, masuk akal nggak? Gila nggak? Ini mah buat bangun sekolah. Daripada beli UPS lebih baik beli genset," katanya.

Anggaran-anggaran tersebut yang diminta oleh DPRD kepada SKPD agar dimasukkan ke dalam APBD. "Ini APBD yang versi dari DPRD, makanya saya tolak, makanya nggak mau saya tanda tangan. Jadi yang model-model gini yang mau dimasukkan. Lihat nih, masak anggaran pembinaan Rp 3,5 m. Class room audio system SDN Rp 5 m. Ini kalau di kampung saya, dana segini bisa perbaiki semua sekolah," katanya.

Menurut Ahok data yang ditunjukkannya itu belum seberapa. Pasalnya, total dana siluman tersebut, mencapai Rp 12,1 triliun.

Semua dana siluman dimasukkan kepada seluruh Dinas-Dinas di jajaran Pemprov DKI. "Dia masukin semua ke kepala dinas, tapi semua kepala dinas menolak, makanya nggak ada tanda tangan karena di e-budgeting nggak bisa

main. Makanya sebelum e-budgeting kepala dinas dipaksa masukin, kalau nggak mau masukin pun balik dari Kemendagri beda lagi isinya," katanya.

## Intel

Lalu bagaimana Ahok menemukan dana siluman tersebut? "Setelah paripurna kami temukan. Setelah pengesahan 3 hari, mereka sibuk tengah malam. Kan kita punya intel nih. Ternyata mereka masukin Excel, potong 10 sampai 15 persen. Masukin duit versi dia, tanda tangan terus print out kirim ke saya. Dia ingin ini yang saya pakai kirim ke Kemendagri," katanya.

Namun, Ahok mengetahui rencana tersebut. Ia pun enggan mengajukan anggaran yang telah berisi dana siluman DPRD itu. "Yang saya kirim yang sudah disahkan di paripurna, bukan versi mereka. Kalau nggak mau begitu buat apa ada paripurna? Begitu ketok palu, langsung kita kirim ke Kemendagri," tegas Ahok.

## Dimiskinkan

Ditanya soal rencananya melaporkan kasus ini, Ahok menjawab, "Siapa yang mau lapor ke Bareskrim? Ngapain ke Kejaksaan? Gue mau bikin bangkrut yang main korupsi dengan kenakan tindak pidana pencucian uang. Gue mau bikin mereka miskin."

Padahal sebelumnya, Ahok menyatakan bakal membuat laporan agar aparat hukum menelusuri temuan adanya anggaran siluman di balik penggunaan hak angket.

Terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Widyopramono, menyatakan siap menerima laporan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. "Ya, kalau Pak Ahok melapor kami siap untuk menindaklanjuti," ujar Widyopramono kepada wartawan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Rabu (25/2). Namun, sampai kekarin, Ahok belum melaporkan hal tersebut.



## Masuk penjara

Jika DPRD siap melakukan Hak Angket kepada dirinya, Ahok pun demikian. Ia mengaku siap melakukan Hak Angket melalui instansi KPK, Kejaksaan, dan Polisi. "Nanti kita lihat. Kan dia punya hak angket menyelidiki kesalahan saya, saya sebagai orang biasa nggak punya hak angket seperti dia. Tapi aparat punya hak angket juga toh. Kabareskrim jaksa agung punya hak angket nggak untuk menyelidiki kegilaan DPRD? Punya kan? Saya boleh nggak minta tolong jaksa agung, polisi dan KPK menyelidiki permainan APBD-nya DPRD boleh dong?" kata Ahok.

Ahok menegaskan, bahwa ia masih menunggu DPRD DKI menggunakan hak angket. "Saya tunggu angket dulu, kan belum angket nih. Suruh angket dulu dong, biar saya juga angketin dia juga, kan seru kan, sama-sama angketin kan, seru begitu loh. Kita tinggal hitung-hitungan saja, apa saya masuk penjara atau anggota DPRD masuk penjara," ujarnya.

## Tak masuk akal

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mengatakan bahwa tindakan tersebut, hanya untuk menyelamatkan diri Ahok sendiri. "Katanya anggaran itu ada di Jakarta Barat. Itu nggak masuk akal. Dia mau laporin juga terserah, itu tipe orang panik. Makanya, dia obrak-abrik ke mana-mana," kata Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/2).

Karena itu, pihaknya pun bersama anggota lainnya, telah sepakat untuk menggelar hak Angket kepada Ahok. "Solusi untuk permasalahan ini nggak ada. Cuma ada satu jalan ke luarnya, (Ahok -red) berhenti (dari jabatan Gubernur DKI—Red)," katanya.

## Cabut Mandat

Sementara itu, warga yang tergabung dalam 'Masyarakat Jakarta Cabut Mandat Gubernur DKI Jakarta (Ahok)', menggelar aksi penggalangan tanda tangan untuk meminta Ahok turun dari jabatannya, di depan Gedung

DPRD DKI Jakarta.

"Kenapa kami cabut mandat? Karena Gubernur Ahok sifatnya sangat arogan. Bahkan pedagang kecil ditantang untuk berantem. Ini apakah mencerminkan gubernur yang layak untuk masyarakat?" katanya.

Hingga saat ini, pihaknya telah mendapatkan 6.000 tanda tangan. Sementara, mereka menargetkan mendapatkan dukungan sekitar satu juta tanda tangan.

Dalam aksinya tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, turut membubuhkan tanda tangannya.

Menurut Taufik, Sidang Paripurna penggunaan hak angket akan digelar di gedung DPRD DKI, Kamis (26/2) ini. "Sudah melalui prosedur di badan musyawarah sehingga sidang paripurna sudah bisa digelar," kata Taufik, Rabu (25/2).

Taufik juga menjelaskan dalam rapat paripurna, pengusul mengusulkan tentang hak angket lalu dilanjutkan dengan pandangan anggota fraksi kemudian usulan dari panitia hak angket. Setelah itu baru disahkan. Taufik sendiri telah mengantongi nama-nama panitia yang berjumlah 33 anggota. Ketua panitia sendiri sudah diumumkan sejak kemarin.

Pimpinan dewan telah memilih Jhonny Simanjuntak (Ketua Fraksi PDIP) sebagai ketua hak angket dan Triwisaksana atau Sani (wakil ketua DPRD dari Fraksi Partai PKS) ditunjuk sebagai wakil ketua hak angket. **(suf/ote)**